

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Politik

Politik berasal dari akar kata dari *polis* (Bahasa Yunani). Jika diartikan secara harafiah, polis berarti kota. Kemudian dalam perkembangannya, politik merupakan sebuah proses atau aktivitas yang terkait dengan pengambilan Keputusan dalam suatu kelompok atau masyarakat, yang mencakup pembuatan kebijakan, distribusi kekuasaan, dan penyebaran ideologi yang melibatkan berbagai interaksi, seperti negosiasi, kompromi, dan kompetisi, dalam rangka mencapai tujuan tertentu.⁹ Sedangkan politik Kristen dapat diartikan sebagai pengaturan kehidupan Bersama dalam Masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip etis Kristen, yang melibatkan penerapan prinsip-prinsip moral Kristen dalam pengambilan Keputusan politik, memperjuangkan keadilan social, mengutamakan pelayanan kepada sesama, dan mengintegrasikan iman Kristen ke dalam partisipasi politik.

Menurut Jhon Calvin sendiri, politik merupakan bagian dari Kerajaan Allah di Bumi. Baginya, politik bukan hanya tentang pengaturan kehidupan sosial dan kekuasaan manusia, tetapi juga tentang bagaimana iman Kristen

⁹ Mifdal Alfaqi, "Memahami Indonesia Melalui Perspektif Nasionalisme, Politik Identitas, Serta Solidaritas," *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* No.2 (2015): 112,113.

mempengaruhi tata Kelola dan keadilan dalam masyarakat. Jhon Calvin memberikan penekanan bahwa pemerintah sangat penting untuk berbuat adil dan memiliki ketaatan kepada prinsip-prinsip moral Kristen dalam memerintah. Calvin juga mengatakan bahwa politik merupakan sarana untuk mewujudkan kehendak Allah di dunia.

B. Politik dan Kehidupan Sosial Jhon Calvin

Jhon Calvin dilahirkan di kota Noyon yang merupakan sebuah kota kecil yang ada di Prancis pada 10 Juli 1509.¹⁰ Ketika Jhon Calvin menetap di Jenewa, ia yang merupakan seorang pengungsi dari Prancis dan juga merupakan ahli Hukum terkemuka, yang Keberadaannya di Jenewa mau tidak mau terlibat dalam kehidupan sosial dan politik. John Calvin merupakan seorang yang praktis dalam sebuah situasi yang nyata. Dia bukan hanya sekadar manusia teori atau orang akademisi saja, namun dalam kehidupannya, ia banyak menjumpai dan mengalami berbagai persoalan yang nyata pada saat ia tinggal di Jenewa. Persoalan-persoalan mengenai ekonomi dan Pendidikan, mengantarkan ia pada perlawanan terhadap tiran dan demokrasi.¹¹

Pada awalnya, Calvin mengikuti jejak yang diharapkan oleh orangtuanya, Gerard Calvin dan Jeanne le Franc, dengan mempelajari filsafat,

¹⁰Francois Wendel, *Calvin: Asal Usul Dan Perkembangan Pemikiran Religiusnya* (Surabaya: Momentum, 2015), 3.

¹¹David W.Hall, *Penghargaan Kepada Jhon Calvin: Perayaan Ulang Tahunnya Yang Ke-500* (Surabaya: Momentum, 2012),20.

sesuai dengan keinginan ayahnya untuk melihat putranya menjadi imam. Gerard, yang bekerja sebagai notaris dan penasihat hukum di katedral, awalnya bermimpi bahwa anak-anaknya akan mengikuti karier agama.

Namun, perubahan tak terduga terjadi ketika sang ayah mengubah arah pandangannya, mendorong Calvin untuk mengejar ilmu hukum sebagai gantinya. Yohanes Calvin pun memutuskan untuk menempuh studi di University of Orleans, kemudian melanjutkan pendidikannya di University of Bourges. Selama masa studi di Bourges, Calvin tidak hanya fokus pada ilmu hukum, tetapi juga merambah pembelajaran bahasa Yunani Koine yang penting untuk memahami Perjanjian Baru. Di tengah proses pendidikannya, Calvin juga terpapar pada pengaruh besar dari gerakan Humanisme yang sedang berkembang di Eropa pada waktu itu.

Pada tahun 1532, Calvin meraih gelar dalam studi hukumnya. Saat itu, Calvin juga mulai tertarik dan terlibat dalam gerakan reformasi agama yang berkembang. Dalam situasi ketegangan keagamaan yang semakin meningkat di Perancis karena peningkatan kekerasan terhadap Protestanisme, Calvin memutuskan untuk mengungsi ke Basel, Swiss.

Selama tinggal di Basel, Calvin menulis dan menerbitkan bukunya yang terkenal, "Institutio", pada tahun 1536. Karya tersebut kemudian mengalami revisi dan pembaruan berkali-kali. Pada tahun yang sama, Calvin juga diajak oleh seorang tokoh reformasi lain dari Perancis, William Farel, untuk membantu dalam upaya reformasi gereja di Jenewa. Meskipun Calvin

tidak pernah ditahbiskan sebagai pendeta, dia secara teratur memberikan khotbah di Basel. Selain itu, Calvin juga aktif dalam melayani sakramen, termasuk baptisan dan perjamuan kudus, serta memberkati pernikahan.

Bersama Farel, Calvin turut menulis beberapa dokumen untuk mengatur kehidupan jemaat di Jenewa. Namun, perlahan-lahan, dewan kota menolak penerapan pemikiran mereka, sehingga keduanya akhirnya diusir dari kota tersebut. Menerima undangan dari Martin Bucer, Calvin pergi ke Strasbourg, di mana dia menjadi pendeta bagi para pengungsi dari Prancis. Di sana, dia memberikan pengajaran setiap hari dan memberikan khotbah dua kali pada setiap hari Minggu. Selama masa di Strasbourg, Calvin terus memberikan dukungan terhadap gerakan reformasi di Jenewa, dan akhirnya dia diundang kembali untuk memimpin gereja Protestan di kota tersebut pada tahun 1541.

Selama masa pelayanannya di Jenewa, Calvin aktif menulis dan membentuk dasar bagi tradisi gereja Protestan yang kemudian dikenal sebagai Calvinisme.¹² Pemikiran-pemikiran Calvin ini telah memberikan dampak besar terhadap teologi gereja-gereja Presbiterian, Kongregasional, dan Reformed di seluruh dunia hingga saat ini. Calvin menikahi Idelette de Bure, seorang janda dengan dua anak dari pernikahan sebelumnya. Meskipun mereka memiliki seorang anak laki-laki yang sayangnya meninggal saat bayi,

¹² Tony Lane, *Runtut Pijar: Sejarah Pemikiran Kristen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015).

kehidupan keluarga mereka cukup berliku. Idelette meninggal sebelum Calvin, dan kepergiannya sangat mengguncang Calvin. Salah satu peristiwa yang mencoreng sejarah hidup Calvin adalah kasus Michael Servetus, seorang Protestan Spanyol yang dianggap sesat dalam ajarannya tentang Trinitas oleh gereja Protestan dan Katolik di Jenewa.

Calvin dan Servetus terlibat dalam perdebatan panjang melalui banyak surat, di mana ajaran Servetus ditolak oleh Calvin. Akibatnya, Servetus akhirnya dibakar hidup-hidup berdasarkan keputusan Dewan Kota Jenewa. Di sisi lain, Calvin dan Martin Luther saling menghormati meskipun tidak selalu sepakat, terutama mengenai hubungan antara gereja dan negara serta makna roti dan anggur dalam Perjamuan Kudus.¹³

Calvin meninggal pada 27 Mei 1564 pada usia 54 tahun. Dalam permintaannya, ia menginginkan pemakamannya dilakukan di sebuah tempat pemakaman umum. Untuk mencegah adanya penghormatan yang berlebihan terhadap makam dan jenasahnya, para pemimpin gereja Reformasi saat itu memutuskan untuk tidak menandai kuburannya. Saat ini, lokasi pasti kuburan Calvin tidak dapat dipastikan. Namun, sebuah batu peringatan telah dipasang di pemakaman de Plainpalais sebagai penghormatan terhadap Calvin.

Jhon Calvin menekankan bagaimana pentingnya keadilan sosial dan

¹³ Mery Kalimon, "YOHANES CALVIN: POLITIK, JABATAN GEREJAWI, DAN RELEVANSINYA BAGI GEREJA MASA KINI," *JURNAL LEDALERO* 15 No. 2 (2016): 259–273.

tanggung jawab sosial dalam Masyarakat. Dia memberi pandangan bahwa orang Kristen wajib untuk saling menolong dan memberi dukungan bagi sesama. Hal ini terlihat dalam praktik hidupnya saat berada di Jenewa, Dimana Calvin serta pengikutnya mendirikan berbagai institusi sosial, seperti rumah sakit, sekolah, serta sistem dukungan sosial lainnya bagi yang membutuhkan. Calvin juga menekankan pentingnya hukum yang adil dan pengaturan yang memberi kebaikan Bersama, sejalan dengan prinsip-prinsip moral Kristen.

C. Teologi Politik Calvin

1. Kedaulatan Allah

Sebagaimana dalam tulisan Calvin sendiri dalam buku *Institutes*, kedaulatan Allah kemudian di ekspresikan dalam tiga hal, yakni: karya pemilihan, penciptaan dan providensi. Membahas mengenai politik, providensi merupakan hal yang sangat penting. Jhon Calvin dengan tegas mengatakan bahwa Allah merupakan penguasa dan juga pemelihara. Bahwa segala peristiwa yang ada didalam dunia ini merupakan sebuah rencana yang rahasia dari Allah. Calvin juga kemudian menjelaskan bahwa karena Ia adalah yang mahakuasa, maka Allah jugalah yang menguasai segala sesuatu. Jadi providensi menurut Calvin adalah sebuah Tindakan Allah yang rutin dan terus menerus sesuai dengan yang ditetapkan-Nya.

Calvin mengatakan bahwa Allah adalah pemimpin dan penguasa

atas segala sesuatu, berdasarkan dengan Hikmat yang dimiliki-Nya dan melakukan apa yang Ia sudah tetapkan.¹⁴ Hal ini yang kemudian mendasari pemikiran Calvin mengenai kedaulatan Allah tentang politik dalam pemerintahan (Negara). Baginya, pemerintah mendapat mandat dan otoritas dari Allah yang dalam hal ini memberi bukti bahwa pemerintah bukanlah hasil karya Manusia.

a. Kedaulatan Allah dalam eksistensi pemerintah

Menurut Calvin, Allah memberikan wewenang kepada pemerintah, menunjukkan bahwa seleksi alam seperti tirani tidak berasal dari anarki, tetapi merupakan hasil dari rancangan Allah. Meeter menegaskan bahwa pemerintah bukanlah kontrak sosial protektif, melainkan respons terhadap kompleksitas kehidupan manusia. Kaum Calvinis kadang-kadang memahami eksistensi negara sebagai refleksi dari dorongan sosial yang ditempatkan pada manusia sebagai gambaran Allah, tetapi hal itu tidak sepenuhnya menjelaskan asal usul negara. Pemerintah adalah bagian dari rancangan Allah dalam memelihara ciptaan-Nya, menegaskan kedaulatan-Nya melalui inisiatif penciptaan pemerintah.¹⁵ Selain itu, Allah memberi otoritas kepada pemerintah untuk menjalankan

¹⁴ Robert L. Reymond, *Penuntun Ke Dalam Theologi Institutes Calvin* (Surabaya: Momentum, 2009), 149-150.

¹⁵ Jhon Calvin, *Institutes Of Christian Religion*, 1926th ed. (Christian Classics Ethereal Library, Grand Rapids, MI, 1845). 4.20.1-4

fungsi keadilan dan kesejahteraan, sesuai dengan Roma 13:4. Menurut Francis Schaeffer, pemerintah menerima otoritas sebagai wewenang yang didelegasikan, bukan otoritas yang otonom.

Calvin menyoroti pentingnya pemerintah sebagai representasi dari pemeliharaan Allah, yang memastikan manifestasi publik dari nilai-nilai kekristenan secara spesifik dan nilai-nilai kemanusiaan secara umum tetap terjaga. Dia dengan tegas mengkritik pendekatan Anabaptis yang berusaha menghilangkan peran pemerintah secara total. Baginya, pemerintah adalah bagian dari desain ilahi yang harus ditebus dan diperbaiki, bukan dihapuskan. Konsep kedaulatan Allah menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat berfungsi secara sembarangan, melainkan harus mengikuti garis-garis preskripsi yang ditetapkan oleh-Nya untuk mencapai tujuan-Nya.¹⁶

Doktrin kedaulatan Allah dalam teologi politik Calvin mencakup juga pemberantasan terhadap anarki. Menurutnya, anarki tidak hanya merupakan bentuk kejahatan yang jelas, tetapi juga memberikan legitimasi bagi peran pemerintah dalam menegakkan keadilan dan ketertiban di masyarakat. Pemerintah dipandang sebagai bagian integral dari wahyu umum dan anugerah umum. Ini

¹⁶ Dr. Abraham Kuyper, *LECTURES ON CALVINISM*, 1999th ed. (America: Wm. B. Eardmans Printing Company, n.d.). 79

berarti bahwa tidak hanya pemerintah menjadi alat bagi Allah untuk menegakkan kehendak-Nya terhadap mereka yang melakukan kejahatan, tetapi juga merupakan manifestasi dari pemeliharaan Allah atas ciptaan-Nya.

Calvin memandang pemerintah sebagai wujud dari wahyu umum karena pemerintah memiliki peran dalam menjaga ketertiban dan keadilan bagi seluruh masyarakat, bukan hanya bagi umat beriman. Bahkan dalam suratnya kepada jemaat di Roma (Roma 13:4), Calvin menekankan bahwa pemerintah bertindak sebagai pelayan Allah yang menghukum mereka yang melakukan kejahatan. Dengan demikian, pemerintah bukan hanya merupakan instrumen dari kehendak ilahi, tetapi juga merupakan ekspresi dari kasih dan perhatian Allah terhadap ciptaan-Nya.

Pendapat Calvin tentang peran pemerintah sebagai anugerah umum juga ditegaskan oleh teolog dan pemikir lainnya seperti Abraham Kuyper, yang menyebut pemerintah sebagai "anugerah umum" atau "*common grace*" yang diberikan oleh Allah untuk menahan segala bentuk kejahatan dan memberikan perlindungan bagi yang baik dari yang jahat. Demikian pula, Hesselink dan Stevenson juga menegaskan bahwa pemerintah adalah anugerah dari Allah yang menunjukkan perhatian-Nya terhadap dunia dan ciptaan-Nya. Oleh karena itu, dalam perspektif teologi politik Calvin,

pemerintah bukan hanya menjadi alat untuk menjaga ketertiban dan keadilan, tetapi juga merupakan manifestasi dari pemeliharaan Allah atas ciptaan-Nya secara umum. Pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan rohani untuk melindungi masyarakat dari anarki dan untuk memastikan kesejahteraan bersama sesuai dengan kehendak Allah.

Dalam perspektif Calvin, motivasi utama manusia untuk taat kepada pemerintah adalah karena pemerintah dipandang sebagai penerima mandat langsung dari Allah. Namun, jika pemerintah mengabaikan kehendak-Nya, hal itu dianggap sebagai penghinaan terhadap otoritas ilahi, dan akan memicu gelombang protes sosial yang tak terkendali, yang pada akhirnya adalah reaksi dari Allah terhadap tindakan melawan-Nya.¹⁷

b. Kedaulatan Allah melawan Tirani

Konsep bahwa Tuhan memiliki kemampuan untuk menggerakkan para pahlawan pembebas untuk menentang pemerintah yang zalim dan memperjuangkan kebebasan bagi kaum yang tertindas, menunjukkan kedaulatan-Nya. Tuhan yang memelihara dan mengatur seluruh alam semesta, bukan hanya memegang kendali atas para penguasa yang tiran, tetapi juga atas

¹⁷ Antonius Steven Un, "Pendasaran Teologis Bagi Pemikiran Politik Jhon Calvin," *Verbum Christi* 2 No.1 (2015): 117.116-152

para pejuang keadilan. Salah satu contoh yang menarik adalah ketika Raja Yoyakim melakukan pembunuhan terhadap nabi Uria dan mayatnya dibuang ke kuburan umum (Yer 26:23). Sebagai perbandingan, saat Yosia dipakai Tuhan untuk mereformasi kehidupan rohani dan ibadah bangsa Yehuda, segala barang berhala dibakar dan abunya dibuang ke tempat pembuangan sampah. Tindakan yang dilakukan oleh Yoyakim terhadap nabi Uria sangatlah memalukan. Namun, kemudian Tuhan membangkitkan bangsa Kasdim (Hab 1:5; Yer 22:26) dan Raja Kasdim, Nebukadnezar, yang membunuh Yoyakim dengan kejam, dan mayatnya dilemparkan ke luar kota seperti mayat keledai. Tuhan membalas kejahatan Yoyakim, lebih keras daripada apa yang dilakukannya terhadap nabi Uria. Tuhan dimuliakan melalui keadilan-Nya terhadap orang-orang jahat.

Allah menunjukkan kedaulatan-Nya dalam menghadapi penguasa tiran dengan membangkitkan para pejuang pembebas yang kuat, juga menggunakan bangsa-bangsa asing, serta memilih orang-orang sederhana sebagai alat-Nya untuk menegakkan keadilan. Dalam penafsiran 1 Samuel 8, kedaulatan Allah terlihat dari pandangan bahwa Allah tidak memberikan izin kepada raja untuk memerintah dengan kekejaman. Calvin menegaskan bahwa para penguasa tiran tidak boleh menjadikan rakyat sebagai budak demi

kepentingan mereka sendiri, karena mereka juga tunduk pada Allah. Meskipun Calvin menentang pemerintahan yang zalim, ia tidak meyakini bahwa pemerintah lalim bebas dari kendali Allah. Bagi Calvin, keberadaan penguasa tiran adalah bagian dari rencana Tuhan sebagai hukuman bagi manusia berdosa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Allah memiliki kendali penuh atas penguasa tiran. Allah mengizinkan keberadaan mereka, memberikan otoritas, dan menetapkan batas-batasnya. Penguasa tiran diizinkan Allah untuk mencapai tujuan-Nya, dan pada waktu yang ditentukan, Allah membangkitkan pahlawan-pahlawan pembebas untuk menggulingkan mereka.¹⁸

c. Kedaulatan Allah dalam hukum pemerintah

Supremasi hukum dan doktrin ekuitas menjadi pijakan penting dalam pemikiran politik Calvin yang didasarkan pada kedaulatan Allah. Konsep supremasi hukum, di mana hukum menjadi "hakim bisu" yang mengatur pemerintahan, mencerminkan upaya untuk mengurangi otonomi dan sifat tidak terkendali dari pemerintah. Hal ini dapat dipandang sebagai bagian dari usaha untuk menyangkal diri, sementara doktrin ekuitas, yang menekankan pemenuhan

¹⁸Ibid, 133-134.

kehendak Ilahi, merupakan aspek dari penerimaan salib, yaitu patuh pada kehendak Bapa di surga.

Doktrin ekuitas menuntut bahwa hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah berakar pada hukum Taurat, yang merupakan hukum moral, yang tertanam dalam hati nurani manusia sebagai wahyu umum. Calvin meyakini bahwa hukum Tuhan yang diwujudkan dalam hukum Taurat, baik secara spesifik dalam hati nurani individu maupun secara umum sebagai wahyu umum, merupakan dasar bagi semua hukum sipil di berbagai bangsa. Allah, dengan menanamkan hukum Taurat dalam hati nurani manusia, bertujuan untuk mengatur pemerintahan-Nya dan menegakkan kedaulatan-Nya atas umat manusia.

D. Politik Teokratis

John Calvin berpendapat bahwa sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa, konsep negara belum ada. Namun, akibat dari kejatuhan tersebut, manusia kehilangan ketergantungan penuh pada Allah dan tidak lagi mampu menggunakan kebebasannya tanpa melanggar hak orang lain atau melakukan kejahatan. Untuk mengatasi situasi ini, Allah menciptakan negara sebagai bentuk intervensi untuk menjaga dan memelihara bumi. Dengan demikian, negara bukanlah bagian dari ordo penciptaan, melainkan dari ordo

pemeliharaan.¹⁹

Teokrasi merupakan keberfokusan terhadap pemisahan antara gereja dan juga negara, dan memberi penekanan yang penting bahwa Allah berkuasa atas hidup manusia. Menurut Calvin, Teokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang memiliki kewajiban kepada Allah. Dalam konsep ini, menjelaskan bahwa Negara dan juga Gereja sama-sama di perintah oleh Allah. Bahwa tugas pemerintah adalah mendukung dan juga memberi perlindungan terhadap pelayanan Gereja, memberi jaminan kebebasan yang teratur, serta menjamin keadilan. Pemimpin gereja dan juga penguasa Negara dalam sistem teokrasi tersebut memiliki tanggung jawab secara langsung kepada Allah.²⁰

E. Hubungan gereja dan Negara menurut Jhon Calvin

Pembahasan serta mendeskripsikan mengenai Gereja dan Negara dalam ajaran Calvin merupakan hal yang tak terpisahkan dari pemahamannya mengenai politik. Meskipun Calvin menekankan pemisahan antara Gereja dan negara, dia juga memiliki kepercayaan bahwa kedua hal tersebut dapat saling mendukung dan mempromosikan keadilan dan moralitas. Gereja dapat memberikan panduan moral kepada Negara, sedangkan Negara dapat memberi perlindungan dan dukungan bagi Gereja. Penolakan Calvin

¹⁹ Binsar A. Hutabarat, "Negara Menurut Perjanjian Lama Dan Hubungannya Dengan Gereja Dalam Konteks Indonesia," *Stulos* 1 No.6 (n.d.): 33–39.

²⁰ *Ibid.* 33-39

terhadap penganut reformasi radikal yang memiliki pandangan bahwa pemerintah itu jahat, merupakan landasan Jhon Calvin dalam pemahamannya mengenai hubungan Gereja dan Negara.²¹

Penganut Reformasi Radikal berargumen bahwa umat Kristen seharusnya tidak memerlukan negara, karena negara dianggap sebagai bagian dari dunia yang berdosa. Sebaliknya, Calvin berpendapat bahwa mereka yang menolak keberadaan pemerintah dan negara tidak memahami kondisi dunia yang masih terpengaruh dosa. Calvin menegaskan bahwa mereka juga kurang menghargai perlindungan yang diberikan Allah melalui struktur pemerintahan untuk melindungi orang-orang baik dari kejahatan. Meskipun Calvin menganggap negara penting bagi gereja selama masa dunia ini, ia tidak menyarankan agar gereja menyerahkan urusan internalnya kepada pemerintah. Sebaliknya, Calvin menekankan perlunya pemisahan dan batas yang jelas antara gereja dan negara, atau antara pemerintahan rohani dan duniawi, dengan menggarisbawahi bahwa keduanya memiliki tugas yang berbeda dari Allah.²² Tujuan dan pembedaan itu sejatinya untuk melakukan pencegahan atas bahaya konflik antara gereja dan negara mengenai agama. Meskipun keduanya memiliki keterikatan, negara tidak memiliki wewenang untuk mengatur apa yang terjadi dalam gereja. Negara hanya sebatas membuat aturan yang sifatnya lahiriah.

²¹Cristian De Jonge, *Apa Itu Calvinisme?* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001) 265.

²²Ibid.

Gereja dan negara menurut Calvin memiliki hubungan yang erat, keduanya berjalan secara berdampingan, dan keduanya memiliki tugas yakni melaksanakan kehendak Allah. Meskipun demikian, ada tugas dari gereja yang tidak boleh diambil alih oleh negara, begitupun sebaliknya. Hal ini berdasar pada konsep Jhon Calvin yang mencita-citakan sebuah pemerintahan yang teokrasi, bahwa segalanya harus dijalankan dengan jujur dan adil, tanpa adanya tekanan untuk sebuah kepentingan individu atau kelompok-kelompok tertentu. Calvin memiliki sebuah pandangan yang positif terhadap Negara. Ia penolakan bahwa gereja sebagai *subordinasi* (dibawah) Negara, tapi keduanya setara dan berdampingan, serta sebagai mitra kerja.²³

F. Pandangan Gereja Toraja Mamasa Tentang Politik

Rumusan pandangan GTM tentang Politik adalah hasil diskusi melalui Lokakaria yang dilakukan oleh BPMS-GTM kerjasama dengan OASE Intim Makassar dengan melibatkan Pendeta, Penatua, Syamas, Politisi (Anggota DPRD) dan perwakilan kaum Perempuan dan Pemuda. Lokakaria dilaksanakan di aula GTM selama 3 (tiga) hari (tanggal 18-20 Maret 2013).

²³ Ibid,4.

Sebagaimana diselaskan dalam pengakuan gereja Toraja Mamasa di

BAB VI Nomor 10 bahwa:

GTM memandang politik sebagai salah satu sarana penting dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menyalurkan hak-hak politiknya. Sebagai warga Negara, maka setiap warga gereja juga dijamin haknya untuk memilih saluran-saluran dan pilihan politik yang berbeda-beda. Sebagai lembaga, Gereja wajib menjaga persekutuan iman, menjaga netralitas, independensi, dan suara kenabiannya. Sebab itu gereja sebagai lembaga, dengan symbol-simbol dan jabatan gerejawinya tidak melibatkan diri dalam politik partisan/ kepartaian misalnya: pilkades, pemilukada, pilpres, dll. Pejabat gereja yang ingin terlibat dalam politik partisan/ kepartaian tidak boleh menggunakan atribut jabatannya dan wajib cuti pelayanan dan penatalayanan.²⁴

Hal ini kemudian diperjelas dalam Rumusan Gereja Toraja Mamasa yang dibuat dalam bentuk dokumen oleh Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa, Bahwa: Jabatan gerejawi merupakan jabatan pelayanan berdasarkan karunia-karunia khusus berupa jabatan pendeta, penatua dan syamas. Jabatan yang satu tidak lebih dari jabatan yang lain. Jabatan yang ada saling menunjang dalam rangka memperlengkapi warga jemaat menjawab panggilan bersekutu, bersaksi dan melayani. Jabatan gereja bukan jabatan karir atau jabatan politik.

Keterlibatan pejabat gereja dalam politik merupakan bagian dari pelayanan gereja sebagaimana halnya bidang-bidang lain, seperti: bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Pejabat gereja yang terjun dalam dunia politik

²⁴ "PANDANGAN GTM TENTANG POLITIK & PERKAWINAN," n.d.

membutuhkan keseriusan dalam bergiat di dalamnya. Keseriusan itu mengharuskannya tunduk sedemikian rupa kepada prinsip dan aturan dalam organisasi politik tertentu. Dan karena “*tak seorang pun dapat mengabdikan kepada dua tuan*” (Mat. 6:24) maka Pendeta dan BPMS GTM yang merupakan tenaga full time yang hendak terjun ke dunia politik, harus melepaskan jabatan gerejawi dan jabatan strukturalnya tersebut sehingga tidak terjadi benturan kepentingan antara tugas sebagai pejabat gereja dengan tugas sebagai pelaku politik, serta menjaga netralitas pelayanannya sebagai pejabat gereja yang melaksanakan fungsi-fungsi khusus, dan tenaga *full time*, tidak memungkinkan dalam satu pribadi dapat melaksanakan dua fungsi secara bersamaan.²⁵

Pada dasarnya, keterlibatan pejabat gereja dalam politik dapat dipahami sebagai perwujudan dari hak asasinya sebagai warga negara, yang dijamin oleh undang-undang. Dalam konteks negara, gereja tidak dapat menghilangkan hak itu. Sehingga, keterlibatan pejabat gereja dalam politik merupakan pilihan dan panggilannya secara pribadi berdasarkan karunia yang bersangkutan.

²⁵ Ibid.

